



**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN**

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024



**PENGADILAN MILITER
I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFFUDIN YOES
NO.39 SEPINGGAN
BALIKPAPAN**

 **FAX / TELP :** (0542) 8520024

 balikpapan@dilmil.org

 www.dilmil-balikpapan.go.id

 [pengadilanmiliterbalikpapan](https://www.instagram.com/pengadilanmiliterbalikpapan)

 [@Militer07](https://twitter.com/Militer07)

 [Pengadilan Militer Bpp](https://www.facebook.com/Pengadilan.Militer.Bpp)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan Pembuatan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2022.

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel.

Kami menyadari bahwa dokumen Reviu Rencan Strategis Tahun 2020-2024 yang disusun ini masih banyak kekurangan, sehingga belum seperti apa yang diharapkan oleh para pimpinan satuan atas. Semoga Reviu Renstra ini dapat benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung”.

Dengan tersusunnya rancangan Reviu Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pada akhirnya Reviu Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam, penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
C. Program dan Kegiatan	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
B. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	19
C. Kerangka Regulasi	27
D. Kerangka Kelembagaan	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
A. Target Kinerja	34
B. Kerangka Pendanaan	38
BAB V PENUTUP	40
Penutup	40

Lampiran

1. Matrik Reviu Rencana Strategis Kinerja 2020 - 2024 pada Tahun 2022
2. Surat Keputusan Tim Reviu Renstra 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

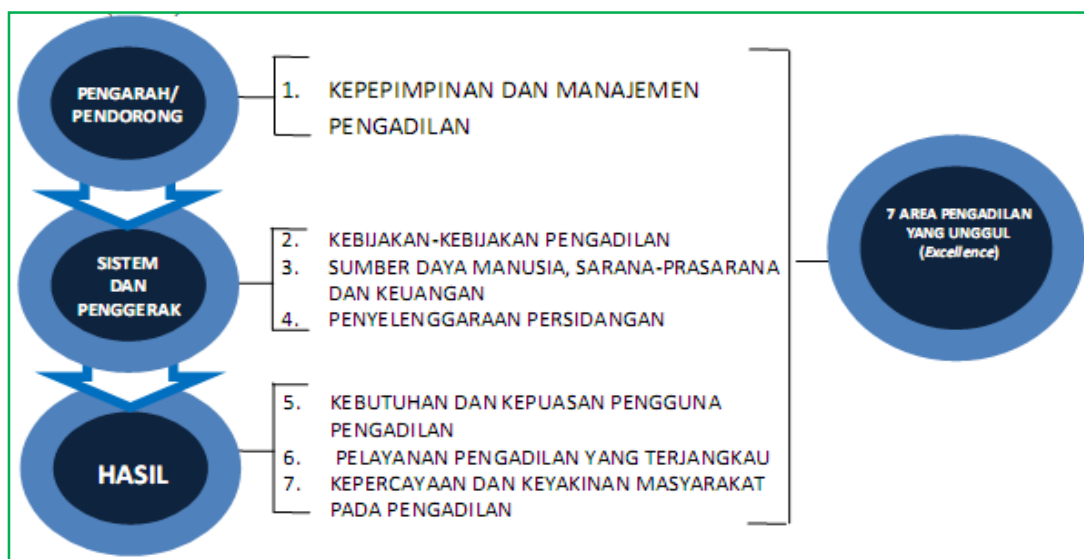
A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat kapten kebawah yang berdasarkan peraturan Perundangundangan yang menjadi wewenangnya, disamping itu juga bertugas mengajukan permohonan Banding, Grasi, Kasasi, serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. dan berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rancangan Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta ditunjang sarana dan prasarana dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik lingkungan

internal maupun eksternal sebagai variabel strategis untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya rancangan rencana strategis pada setiap Kementrian/Lembaga Negara, termasuk lembaga Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajarannya. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan bagian dari Pengadilan Militer di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut:



Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada awal tahun 2022 sampai dengan saat ini, jumlah pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan jabatan dan golongan seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Kepala	1 orang	
2.	Wakil	1 orang	
3.	Hakim	3 orang	1 (satu) orang Bp Dilmil III-13 Madiun
4.	Panitera	1 orang	
5.	Penitera Muda Pidana	1 orang	
6.	Panitera Muda Hukum	-	
7.	Panitera Pengganti	2 orang	
8.	Sekretaris	1 orang	
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 orang	
10.	Kasbbag Umum Dan Keuangan	1 orang	
11.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang	
12.	Staf Kepaniteraan	3 orang	
13.	Staf kesekretariatan	3 orang	
14.	PPNPN	8 orang	

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah
		TNI	ASN	CPNS	
1.	IV/d	-	-	-	-
2.	IV/c	1	-	-	1
3.	IV/b	2	-	-	2
4.	IV/a	4	-	-	4
5.	III/d	-	2	-	2
6.	III/c	-	-	-	-
7.	III/b	1	2	-	3
8.	III/a	-	1	-	1
9.	II/f	-	-	-	-
10.	II/e	-	-	-	-
11.	II/d	3	-	-	3
12.	II/c	-	1	2	3
13.	II/b	-	-	-	-
14.	II/a	-	-	-	-
15.	I/d	-	-	-	-
16.	I/c	-	-	-	-
19.	I/b	-	-	-	-
18.	I/a	-	-	-	-

B. Potensi Permasalahan.

1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a) Pimpinan Peradilan Militer memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
- b) Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
- c) Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/Instansi lain.
- d) Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah Prototype dan Representatif digunakan sejak tahun 2015.
- e) Peradilan Militer I-07 Balikpapan sudah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel
- f) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat (militer) pencari keadilan (justice for all)
- g) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Militer I-07 Balikpapan.
- h) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berstandar Penjaminan Mutu ISO 9001:2015.
- i) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Akreditasi serta sudah melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021 dengan Predikat "A" (Excellent).

- j) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- k) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Zona Integritas dan belum memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- l) Menyediakan fasilitas sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada anggota TNI dan Masyarakat pengguna layanan peradilan seperti tempat ibadah berupa Musholla, fasilitas penyandang disabilitas, ruang laktasi, tempat bermain anak, pojok koran, loker senpi dan sajam, ruang perpustakaan, ruang tunggu tamu, disediakan baju dan sepatu bagi para saksi yg tidak memakai baju yang pantas dipersidangan, tempat semir sepatu, pojok baca, charger chornor, command center, area taman terbuka, layanan wifi gratis, ruang tamu VIP, smooking area.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirinci dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

- Adanya kekosongan formasi jabatan, sehingga tugas dan tanggungjawab masih di rangkap oleh beberapa staf di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia yang berkompeten adapun Personel yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari Pranata Komputer, Penyusun Rencana Kegiatan, Penyusun Laporan Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Arsip Paris.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Proses Peradilan

- Memaksimalkan media website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu layanan informasi, pengaduan, upaya hukum dan pendaftaran elektronik bagi masyarakat pencari peradilan.
- Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk melihat data perkara.
- Melaksanakan sidang keliling untuk meningkatkan penyelesaian perkara tepat waktu.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Memaksimalkan personel untuk mengisi jabatan struktural dan fungsional yang kosong.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal melalui penunjukan hakim pengawasan bidang serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan dari Pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Menetapkan dan menerapkan evaluasi kinerja sesuai dengan Job Discription.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1.1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Militer serta antar komunitas hukum di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Mendayagunakan secara maksimal sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berupa internet, website dan aplikasi-aplikasi pendukung manajemen peradilan lainnya.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personel di Pengadilan I-07 Balikpapan yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan I-07 Balikpapan.
- Dengan struktur organisasi yang baru pembinaan karir belum maksimal karena personel yang menduduki jabatan belum mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum tepat dengan kebutuhan yang ada.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGIS

A. Visi Dan Misi

VISI

Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu **“Mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung”**.

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian dan atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

1. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan ibu kota Kalimantan Timur daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya adalah wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris, Kasubbag beserta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan tujuan strategis, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Tahun 2020 – 2024. sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian

hukum. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan sasaran strategis yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara antara lain:

- 1) Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.
- 3) Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- 4) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tertib administrasi perkara merupakan proses peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan sasaran strategis yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara antara lain:

- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

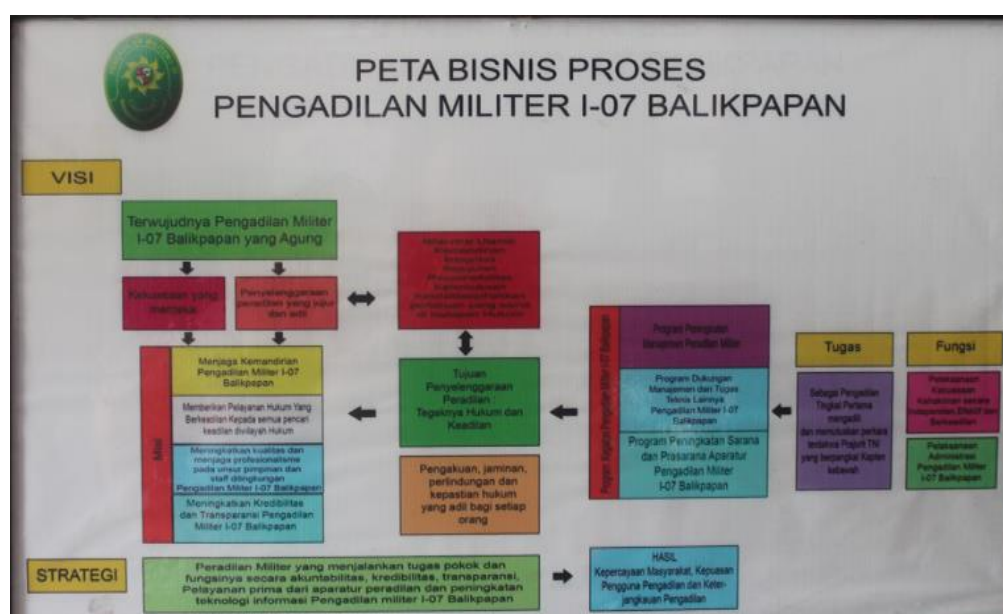
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai wilayah hukum yang luas yaitu meliputi wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dimana jarak tempuh antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang panjang sehingga sering terjadi kesulitan untuk mendatangkan Terdakwa maupun saksi ke dalam persidangan. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sidang diluar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling diharapkan percepatan penyelesaian perkara bisa tercapai. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah:

- Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama selaras dengan Peta Proses Bisnis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan digambarkan sebagai berikut :

PETA BISNIS PROSES PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



**MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<i>TUJUAN STRATEGIS</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA UTAMA</i>
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding 3. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

C. Program Dan Kegiatan

Bahwa indikator kinerja utama sebagai tolak ukur atas keberhasilan dilakukan melalui 3 (tiga) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07

Balikpapan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah:

1. Penelitian berkas perkara tingkat pertama disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
3. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara dan putusan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT, Website Pengadilan I-07 Balikpapan www.dilmil-balikpapan.go.id.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014 dan 2015-2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memperhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara.
2. Proses perkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.
3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.
4. Restorative Justice.
5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**", maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).

5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. SPPTTI.
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.
4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor.
5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, Maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran strategis tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Program ini terdiri dari kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
2. Program Dukungan Manajemen, Program ini terdiri dari kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a) **Manajemen Perubahan**

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 7 (Tujuh) program reformasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mensosialisasikan Reformasi Birokrasi secara berkala, kontinyu dan berkelanjutan.
2. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.
3. Road Map Reformasi Birokrasi.
 - a. Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
 - b. Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mencakup 8 area perubahan yaitu :
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Penataandan Penguatan Organisasi;
 - 4) Penataan Tatalaksana;
 - 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - 6) Penguatan Pengawasan;
 - 7) Penguatan Akuntabilitas;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Pemilihan Role Model
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan Pemilihan Role Model setiap Tahun secara terus menerus.
5. Mempublikasi semua kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di website dan media sosial resmi satker seperti facebook, Instagram, twitter dan channel youtube.
6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara terus menerus dan berkelanjutan diawali dengan Pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
7. Monitoring dan pelaksanaan RB dan Zona Integritas. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengadakan rapat sosialisasi RB dan Zona Integritas secara mandiri dan terjadwal dan meminta laporan serta evidence kepada tiap tiap area.

b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Sosialisasi Perma

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan pembinaan dan sosialisasikan secara berkesinambungan mengenai Maklumat KMA Nomor 01/Maklumat/ KMA/IX/ 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan peradilan di Bawahnya.

2. Sosialisasi Tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan sosialisasi SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan.

3. Sosialisasi Keputusan Sekma Tentang Penegakan Disiplin Kerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan sosialisasi Keputusan Sekma Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

c) Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Evaluasi Penguatan Organisasi berdasarkan Perma 07 Tahun 2015

tentang Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mensosialisasikan Perma No. 7 Tahun 2015 dan mengaplikasikan dalam rapat dinas.

2. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit bagian. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan tugas sudah menurut jenjangnya.
3. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit Bagian. Masih adanya duplikasi fungsi dalam tugas dan jabatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disebabkan kurangnya personil Militer yang menjabat sebagai Panmud Hukum dan tenaga pengamanan atau provost, upaya yang dilakukan dengan pengajuan kebutuhan personil Militer tersebut ke instansi atas.
4. Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit Bagian. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui atasan langsung telah memberikan penilaian kinerja kepada seluruh Pegawai setiap bulannya melalui PKP.
5. Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih dengan unit kerja/bagian lain. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tidak terdapat tumpang tindih antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, hanya pada bagian kepaniteraan terdapat jabatan yang masih kosong yakni jabatan Panmud Hukum sehingga tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut dikerjakan oleh staf kepaniteraan. hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya personil sesuai dengan Struktur Organisasi dan sudah melakukan upaya pengajuan personil ke satuan atas.

d) Penataan Tatalaksana

1. Standart Operating Prosedure (SOP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Monitoring pelaksanaan SOP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan, setiap SOP tersebut sudah dilakukan monitoring dan revidi secara berkala.

3. E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan transparansi). Seluruh Aplikasi Online yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan baik turunan dari Mahkamah Agung maupun dari Kementerian keuangan telah di upload di Website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Pada saat ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki inovasi **Media Layanan Informasi I-07 (MELANI I-07)** yang berupa layanan chat online yang berbasis Whatsapp Business Auto Reply di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dimana terdapat beberapa "Menu" yaitu : **Keskretarian** (Informasi tentang satuan secara general), **Kepaniteraan** (Informasi seputar info perkara dan jadwal sidang), **Pengaduan** (Informasi tentang pengaduan), **Pelayanan** (Informasi seputar e-form layanan informasi), Layanan Prioritas (Layanan khusus kelompok rentan). Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Keterbukaan informasi publik (SK KMA No.1-144 Tahun 2011). Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengimplementasikan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan cara menetapkan maklumat pelayanan dan standar pelayanan, dan SK tentang keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan dan di sosialisasikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

e) **Penataan Sistem Manajemen SDM**

1. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Analisa kebutuhan Pegawai disempumakan dengan mengacu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007.
2. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan kegiatan pelatihan, pendidikan, diklat dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan cara

mengusulkan personil untuk diikut sertakan kegiatan tersebut kepada satuan atas.

3. Penetapan Sasaran Kinerja Individu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penetapan Kinerja Pegawai (PKP) kepada seluruh pegawai.
4. Penekanan aturan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
5. Sistem Informasi Kepegawaian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan penunjukan Operator Aplikasi SIKEP sehingga data seluruh pegawai diupload di Aplikasi SIKEP secara up to date.

f) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Renstra dan melakukan reviu terhadap Renstra 2020 - 2024, melakukan reviu IKU, membuat Rencana Kinerja Tahunan, dan membuat Rencana Aksi. Pimpinan Pengadilan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra, Reviu IKU, membuat Rencana Kinerja dan Rencana Aksi.
2. Penyusunan Penetapan Kinerja. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah membuat Penetapan Kinerja Tahunan yang ditandatangani oleh Kadilmil dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
3. Pencapaian kinerja secara berkala. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah membuat LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan), Laporan Triwulan/ Semesteran Pengelolaan Keuangan. Pimpinan Pengadilan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah mengusulkan dan mengikutsertakan personil yang menduduki jabatan Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur untuk mengikuti Diklat Penyusunan

Sakip yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mempin Mahkamah Agung bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2021.

5. Sistem Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Personil dilakukan setiap bulan dan dilaksanakan secara berjenjang.
6. Pemutakhiran data kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sudah melaksanakan pengisian capaian kinerja penyelesaian perkara pada aplikasi Komdanas, penginputan Smart, Monev dan Monev Bappenas diinput secara terjadwal.

g) Penguatan Pengawasan

1. Membuat Kebijakan Penanganan Gratifikasi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat kebijakan tentang penanganan Gratifikasi, Kadilmil telah melakukan Sosialisasi Gratifikasi baik pada setiap Apel maupun pada agenda rapat dinas selain itu juga disosialisasikan pada website, media sosial resmi satker dan melalui pemasangan banner-banner pada area pelayanan.
2. Membuat Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Terdapat Sistem Pengendalian Intern yang di buat dalam bentuk laporan dari para Hakim Pengawas Bidang yang di tunjuk untuk mengawasi di bidang kepaniteraan, Umum dan Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepegawaian dan Ortala serta pengawasan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setiap temuan yang ditemukan oleh Hakim Pengasan Bidang dilaporkan kepada Kadilmilt dan ditindaklanjuti oleh bagian masing-masing untuk dilakukan perbaikan terhadap temuan Kimwasbid tersebut.
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat telah di sosialisasikan dan di Implementasikan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengeluarkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat dan SK petugas yang melayani Pengaduan Masyarakat.
4. Membuat Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan melakukan sosialisasi Undang Undang

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

5. Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang.

h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan SK KM A No. 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 dalam penerapan Standar Pelayanan yang telah dimaklumkan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Penerapan Standar Pelayanan dan memasang maklumat pelayanan pada area pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Implementasi SOP Standar pelayanan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah memiliki SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

3. Pelayanan Informasi yang akuntabel dan berbasis IT. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah menyampaikan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media seperti website dan media sosial resmi satker dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi **"MELANI I-07" (Media Layanan Informasi I-07)** kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan untuk mengakses dan memperoleh informasi pengadilan secara online.

4. Pelayanan terpadu.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah memiliki sarana layanan terpadu satu pintu (PTSP).

5. Terdapat inovasi pelayanan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah terdapat inovasi pelayanan.

6. Sarana dan prasarana media pengaduan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah terdapat media pengaduan melalui aplikasi Siwas Mahkamah Agung.

7. Implementasi SOP Pengaduan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah terdapat SOP pengaduan.

8. Pengelolaan Unit pengaduan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah terdapat Unit yang mengelola pengaduan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan pengaduan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sampai dengan saat ini belum menerima pengaduan.

10. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan setiap triwulan.

11. Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga melaksanakan survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi terkait pelayanan dan penyelesaian perkara dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan.

12. Pelaksanaan publikasi survey.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melakukan publikasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPAK).

13. Melakukan evaluasi atas hasil survey dan kepuasan masyarakat.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat.

C. Kerangka Regulasi

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM

Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/ Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Adapun Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan antara lain adalah sebagai berikut:

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian

		Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
5.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK /OT.01.3/ 10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
12.	Instruksi Mahkamah Agung RI	Surat Kepala Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 190/S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022
13.	SK KMA Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 351/KMA/SK/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022

14.	Penunjukan daerah implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN PG4N	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2410/SEK/OT.01.1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022
15.	Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Procurement Implementation Management And Accountabillity pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 237/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022
16.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022
17.	Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022
18.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022
19.	Arahan Presiden	surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 877/SEK/KS.00/4/2022 tanggal 11 April 2022
20.	Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

KERANGKA REGULASI

<i>ISU STRATEGIS</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN 2020-2024</i>	<i>ARAH KERANGKA REGULASI</i>	<i>KEBUTUHAN REGULASI</i>	<i>BAGIAN PENANGGUNG JAWAB</i>
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	a. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b. Peningkatan pelayanan publik	a. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
	b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding		b. SK Kepala tentang Tim Implementasi dan Penanggung jawab SIPP	
	c. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi		c. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik	

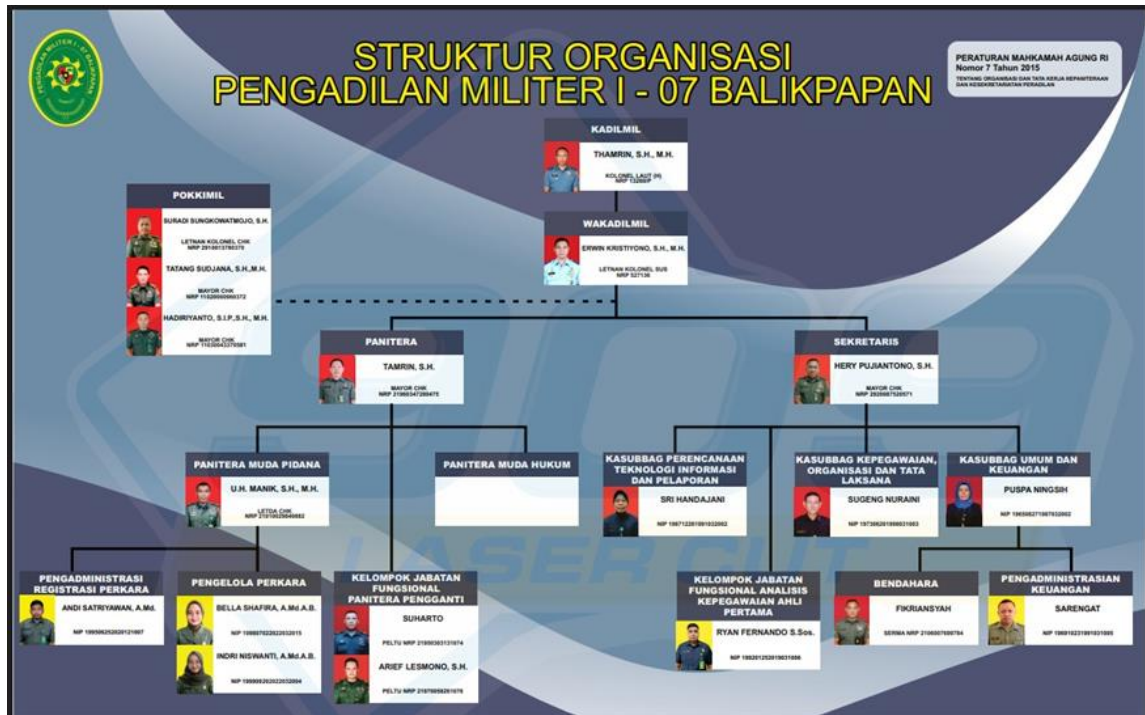
	d. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Peningkatan pelayanan publik	a. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik b. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	f. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Penambahan volume sidang keliling	Membuat rencana sidang keliling dan Surat Perintah dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang pelaksanaan Sidang Keliling	Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

D. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai Struktur Organisasi per Januari 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran strategi dan mengacu pada Program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Tujuan Strategis sebagai berikut:

a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan.

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

Selesai penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat biaya ringan dan akuntabel dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Tujuan Strategis ini merupakan turunan dari 3 (tiga) sasaran strategis antara lain:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Sasaran Strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer yang terdiri dari kegiatan:

- a. Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang terdiri dari:
 - 1) Pendaftaran berkas perkara;
 - 2) Penunjukan Hakim (Tapkim);
 - 3) Penetapan Hari Sidang (Tapsid);
 - 4) Pemeriksaan sidang di Pengadilan;
 - 5) Pengiriman Surat penahanan dan perpanjangan penahanan;
 - 6) Pengiriman petikan putusan dan Salinan putusan;
 - 7) Minutasi perkara dan Upaya Hukum;
 - 8) Penanganan perkara upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu kegiatan yang dilakukan diluar Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Sidang Keliling.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	2. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	3. Presentase perkara yang tidak	90%	90 %	90 %	90 %	90 %

	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.					
	4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	90%	95%	95%	95%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100 %	100 %	100%	100 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100 %	100 %	100%	100 %

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan program dukungan manajemen ini di jabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu:

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Pengelolaan belanja operasional dan pemeliharaan kantor terdiri dari:
 - a. Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran.
 - b. Belanja langganaan daya dan jasa.
 - c. Pemeliharaan kantor.

- d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
- e. Konsultasi ke KPPN, KPKNL.
- f. Penanggulangan covid-19.
- g. Hak Keuangan dan bantuan sewa rumah dinas.

3. Dukungan manajemen non operasional satker.

b. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

B. Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Pendanaan				
			2020	2021	Prakiraan Maju			2020	2021	Prakiraan maju		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum								65.420.000	98.809.000	103.600.000	110840.000	187.950.000
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001. Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	124.800.000
		U03 Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	115 PRK	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	63.150.000
Program Dukungan Manajemen								3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	5.005.269.740
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	1066 EB Layanan Dukungan Manajemen Internal	051. Dukungan manajemen non operasional satker daerah	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	8.600.000	5.000.000	4.634.000	8.654.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.6320000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.475.944.240

		002. Operasional dan Pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.343.994.000	1.409.733.000	1.633.683.	1.485.079.000	1.63.047.000
Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Pendanaan				
			2020	2021	Prakiraan Maju			2020	2021	Prakiraan maju		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
1071 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1071 EBB Layanan sarana dan prasmanan internal	051 Layanan saranan Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.000.000	-	-	351.500.000	917.624.000
		971.Layanan prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	--	37.500.000	10.000.000	63.261.000	-

BAB V

PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020- 2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan Strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan. Dan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

LAMPIRAN : 1. Metrik Rencana Strategis 2022-2024

2. SK Time Reviu Rencana Strategis 2020-2024

1. Metrik Rencana Strategis 2022-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG
 MISI : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
 PENGADILAN MILITIER I-07 BALIKPAPAN
 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENEN- GAH	SASARAN		TARGET					SASARAN				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasann ya terpenuhi	a.Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesai an Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	136 Perkara	Rp. 62.240.000

		b.Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		b.Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		
		c.Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%		c .Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		

											Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		d.Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95%		d.Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	95%	95%	95 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan		
2.	Tersampaikannya salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		

3.	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100 %	100 %	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Pembinaan Administrasi dan	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	10 Perkara	Rp. 48.600.000,-
----	--	--	------	---	--	------	-------	-------	------	------	---	----------------------------	---	------------	------------------

Koramil Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin
Thamrin, S.H., M.H.
Koramil Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

2. SK Time Reviu Rencana Strategis 2020-2024



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/61/KP.01/KEP/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Startegis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



T. Amrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil07/61/KP.01/KEP/II/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Sus Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Tamrin, S.H.
	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Hery Pujiyanto, S.H.
4	Pelaksana	Sri Handajani
5	Tim Pengolah Data	1. Bella Shafita, A.Md.A.B 2. Rendy Pratama Putra, S.Kom. 3. Aloysia Maria Wahyu Widiyaningsih, S.Kom 4. Muhammad Subky, S.H. 5. Hayaturida Rusnawati, A.Md
6	Sekretariat	Puspa Ningsih

W1-Mil07/61/KP.01/KEP/II/2023



Thamrin, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13620/P



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp/Fax : 0542-8520024

Balikpapan, 03 Januari 2023

Nomor : W1-Mil07/Und-04/I-07/I/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Seluruh Personel Dilmil I-07
Balikpapan
di
Tempat

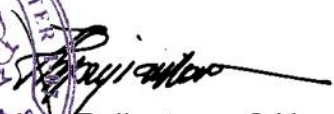
Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dilmil I-07 Balikpapan
Notulis : PPNPN M.Subky, S.H

Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Sekretaris


Hery Pujiyanto, S.H.
Mayor Ck NRP 2920087520571



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 SEPINGGAN BALIKPAPAN
E-mail : balikpapan@dilmil.org
Telp/Fax : 0542-8520024

NOTULEN RAPAT

- I. Pelaksanaan Hari/tanggal : Senin, 09 Januari 2023
Jam : 09.00 wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dilmil I-07 Balikpapan
- II. Pimpinan Rapat : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- III. Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Rapat
3. Saran/Masukan
4. Penutup

Adapun isi dari Rapat pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 tersebut adalah Pembahasan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara keseluruhan, Terdiri dari :

- I. Review Renstra (Rencana Strategi) 2020-2024
- II. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- III. RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
- IV. LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- V. PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

I. REVIEW RENSTRA

Terkait penambahan renstra secara umum Kinerja Utama dan Indikator tidak ada perubahan. Hanya saja diperlukan perubahan pada target capaian sehingga di dapat laporan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi riil didalam instansi pemerintahan. Sehingga laporan lebih akurat dan akuntabel.

Pada rapat ini diperoleh kesepakatan target capaian yang akan dituangkan di dalam enstra oleh Kepala, Panitera, Panitera Muda dan Kasubag antara lain:

- 1. Pada Point Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel
 - a. Presentase sisa perkara pidana dan Lalu Lintas berapa target, realisasi, dan capaian yang telah dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara pidana militer target 100%
 - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas target 100%

- b. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan dicapai setara target atau tidak.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu 95%
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan 100%
- c. Persentase Sisa Perkara Pidana dan Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu.
 - Sisa Perkara Pidana yang telah diselesaikan tepat waktu 95%
 - Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas yang telah diselesaikan tepat waktu 100%
- d. Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Target 90% Capaian 95,23%
- e. Persentase perkara yang tidak menggunakan Upaya Hukum Kasasi Target 90% Capaian 91,39%
- f. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Target 95%

II. **IKU (Indikator Kinerja Utama)**

Di dalam IKU akan dituangkan hasil kesepakatan atas target capaian pada Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

III. **RKT (Rencana Kinerja Tahunan)**

Rencana kerja yang akan dituangkan sebelum ada Renstra Baru terkait Kinerja Utama dan Rencana Kerja Lima Tahunan, Maka Rencana Kerja Tahunan, mengikuti hasil review Renstra.

IV. **LKJIP 2022**

Laporan Kinerja harus segera diselesaikan sesuai dateline yang diberikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sehingga tidak akan mempengaruhi laporan hasil evaluasi terkait ketepatan waktu penyelesaian laporan. Diharapkan bagian-bagian terkait untuk membantu pengumpulan data agar operator dapat segera menyelesaikan pelaporan.

Rapat di selesaikan dan ditutup langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Hamrin, S.H., M.H
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Notulis



Muhammad Subky, S.H



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

ABSENSI KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2023

Perihal : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024)

NO	NAMA NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Kolonel Laut (KH) Thamrin, S.H., M.H. 13620/P	Kadilmil		
2	Letnan Kolonel Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP 527136	Wakadilmil		
3	Mayor Chk Hery Pujiyanto, S.H. 2920087520571	Sekretaris		
4	Mayor Chk Tamrin, S.H. 21960347280475	Panitera		
5	Puspa Ningsih Penata TK I (IId) 196508271987032002	Kasubbag Umum dan Keuangan		
6	Sri Handajani Penata TK I (IId) 196712261991032002	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan		
7	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IId) 199807022022032015	Pengelola Perkara		
9	Alfiani Hayaturrida Rusnawati, A.Md.	PPNPN		
10	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN		
11	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom.	PPNPN		
12	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN		

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Kasubbag Umum dan Keuangan

Puspa Ningsih
Penata Tk.I NIP 196508271987032002



PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN

JL. SYARIFUDDIN YOES NO. 39 BALIKPAPAN

E-mail : balikpapan@dilmil.org

Telp. (0542) 8520025, (0542) 8520026, Fax : (0542) 8520024

Dokumentasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024)

